

**Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 45 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

SYLVIA NIDIA FRANSISCA
12120018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 45 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

SYLVIA NIDIA FRANSISCA
12120018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sylvia Nidia Fransisca
NPM : 12120018
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45
Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Pada Paroki Redemptor Mundi Di
Surabaya

**Pembimbing,
Tanggal, 29/01/2016**

(Dra. Jeanne A. Wawolangi.,MSI.,AK.,CA)

**Mengetahui :
Ketua Program Studi
Tanggal, 29/01/2016**

(Dra. Jeanne A. Wawolangi.,MSI.,AK.,CA)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan
untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh (Sylvia Nidia Fransisca) dengan NPM (12120018)

Telah diuji pada 29/01/2016

Dinyatakan LULUS oleh :

Ketua Tim Penguji

(Dra. Jeanne A. Wawolangi.,MSI.,AK.,CA)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi,

(Dra. Maria Widyastuti, M.M)

(Dra. Jeanne A. Wawolangi.,MSI.,AK.,CA)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Judul skripsi Penerapan PSAK No.45 Dalam Penyusunan Laporan
Keuangan Pada Paroki Redemptor Mundi Di Surabaya

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Jumat Tanggal 29/01/2016

Disusun oleh :

Nama : Sylvia Nidia Fransisca

NPM : 12120018

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

1. Dra. Jeanne A. Wawolangi.,MSI.,AK.,CA

2. Nia Yuniarsih.,SE.,MSA

3. Drs. Soedjono Rono., MM



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sylvia Nidia Fransisca

Fakultas/ Prodi : Ekonomi/ Akuntansi

Alamat Asli : Pondok Sidokare Indah Blok C No.2

No Identitas. KTP : 3515024810930003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Penerapan PSAK No.45 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Paroki Redemptor Mundi Di Surabaya

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah saya ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 29/01/2016

Hormat saya,

Sylvia Nidia Fransisca

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Paroki Redemptor Mundi Di Surabaya”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib dan merupakan syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penyusunan proposal skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada :

1. Tuhan Yesus yang selalu membimbing, membantu, dan memberikan jalanNya dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi., MSI., AK., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika, dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Margo Saptowinarko P.,S.E.,M.Kes.,Ak selaku dosen Prodi Akuntansi yang banyak memberikan pengetahuan, saran, masukan, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5. Ibu Dra. Melani Gunawan., Ak selaku pembimbing dan Bendahara Paroki yang banyak membantu mengarahkan dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Mami, serta adik tercinta dan emak yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat dan mendoakan.
7. Sahabat-sahabat selama perkuliahan Ellen Avio, Yolanda Indarto dan teman-teman yang lain yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
8. Koko Stev yang banyak memberi support serta mendoakan penulis.

Surabaya, Januari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Organisasi Nirlaba.....	7
2.1.1.1 Pengertian Organisasi Nirlaba.....	7
2.1.1.2 Karakteristik dan Tujuan Organisasi Nirlaba.....	8
2.1.2 Akuntansi.....	10
2.1.2.1 Pengertian Akuntansi.....	10



2.1.2.2 Tujuan Akuntansi.....	11
2.1.2.3 Fungsi dan Kegunaan Informasi Akuntansi.....	13
2.1.3 Laporan Keuangan.....	14
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	14
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	14
2.1.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan.....	16
2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan (SAK).....	17
2.1.4.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK).....	16
2.1.4.2 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba.....	22
2.1.5 PSAK No.45.....	23
2.1.5.1 Pengertian dan Tujuan PSAK No.45.....	23
2.1.5.2 Sifat Pembatasan Dana.....	23
2.1.5.3 Komponen Laporan Keuangan Nirlaba.....	24
2.1.6 Ruang Lingkup Paroki.....	29
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Atau Sebelumnya.....	35
2.3 Rerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	39
3.2.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2.2 Sumber Data.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Satuan Kajian.....	41



3.5 Teknik Analisis Data.....41

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....43

 4.1.1 Sejarah Singkat Organisasi.....43

 4.1.2 Jenis Usaha.....44

 4.1.3 Struktur Organisasi.....46

 4.1.3.1 Job *Deskripsi*.....47

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....52

 4.2.1 Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Paroki Redemptor Mundi.....52

4.3 Pembahasan dan Analisa Data.....56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....68

5.2 Saran.....69



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi (Dewan Paroki) Redemptor Mundi.....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bendahara Paroki Redemptor Mundi.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan.....	58
Tabel 4.2 Laporan Aktivitas.....	59
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas (Metode Langsung).....	61
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung).....	63
Tabel 4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	64
Tabel 4.6 Kas dan Setara Kas.....	65
Tabel 4.7 Umur dan Nilai Residu Aset Tetap.....	65
Tabel 4.8 Metode Penyusutan Garis Lurus.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Laporan Arus Kas Dan Bank Paroki Redemptor Mundi Periode 1 Januari 2014
S/D 31 Desember 2014
- Lampiran 1.2 Laporan Posisi Keuangan
- Lampiran 1.3 Laporan Aktivitas Bentuk A
- Lampiran 1.4 Laporan Aktivitas Bentuk B
- Lampiran 1.5 Laporan Perubahan Aset Neto
- Lampiran 1.6 Laporan Perubahan Aset Neto (Alternatif)
- Lampiran 1.7 Laporan Arus Kas (Langsung)
- Lampiran 1.8 Laporan Arus Kas (Tidak Langsung)
- Lampiran 1.9 Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan A)
- Lampiran 1.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan B)
- Lampiran 1.11 Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan C)
- Lampiran 1.12 Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan D)
- Lampiran 1.13 Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan E)
- Lampiran 1.14 Catatan Atas Laporan Keuangan (Catatan F)



Paroki merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Standar Akuntansi Keuangan tersebut tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 45 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan kepada para pemakai laporan keuangan suatu organisasi untuk kepentingan informasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal organisasi. Laporan keuangan yang ada di Paroki Redemptor Mundi disusun sesuai dengan Tata Dasar dan Peraturan Paroki, namun Paroki Redemptor Mundi belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam PSAK No. 45. Dengan demikian, Paroki dalam pengelolaan keuangan berpedoman pada PSAK No 45 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kata kunci : Organisasi nirlaba, PSAK No. 45, Laporan keuangan.



Parish is one form of non-profit organizations in the field of religion. Indonesian has established the Financial Accounting Standards Board on the financial statements of non-profit organizations. The Financial Accounting Standards contained in the Statement of Accounting Standard (PSAK) 45 as a non-profit organization, should also be entitled to make a financial report. The activities carried out in the accounting process includes recording, classifying, summarizing, and reporting to the users of the financial statements of an organization for the benefit of information and decision making better for the organization's internal and external parties. Financial statements in Redemptor Mundi Parish prepared in accordance with the Rules and Regulations Basic Parish, but the parish Redemptor Mundi has not implemented the preparation of financial statements in accordance with the format of the financial statements of non-profit organizations that exist in PSAK No. 45. The parish financial management guided by PSAK No. 45 which established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI)

Key words : *Non-profit organizations, PSAK No.45, Financial statements.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran akuntansi di zaman globalisasi ini sangat diperlukan perusahaan pemerintahan, perseorangan, maupun organisasi lain baik dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak mencari laba atau organisasi nirlaba, untuk memperoleh berbagai data keuangan yang penting, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk laporan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Akuntansi pada dasarnya adalah merupakan kegiatan yang mengolah transaksi-transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang siap pakai. Proses akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan tersebut, yaitu pihak intern dan pihak ekstern (Septianita, 2011:1). Pihak intern adalah kelompok yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Sedangkan bagi pihak eksternal, adalah kelompok yang menggunakan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban perusahaan dan dasar untuk pengambilan keputusan bagi *stakeholder*. Adapun pengelolaan sumber daya dengan membuat laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis, namun juga organisasi nirlaba.

Organisasi nirlaba memiliki karakter dan tujuan yang berbeda ketika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba berdiri untuk



mewujudkan perubahan peningkatan kesejahteraan pada individu atau komunitas tanpa bertujuan untuk memperoleh laba, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan.

Organisasi nirlaba sebagai sebuah organisasi yang tidak bertujuan mencari laba misalnya organisasi keagamaan, salah satunya adalah Paroki Redemptor Mundi Surabaya. Paroki Redemptor Mundi dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena tujuan organisasi adalah untuk pelayanan dalam hal keagamaan, dan Paroki memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Sebagai *feedback* organisasi tersebut juga berkewajiban melakukan pelaporan kepada umat sebagai bentuk akuntabilitas dan informasi bagi para penyumbang dan para umat yang membutuhkan informasi tentang keberadaan dan kondisi keuangan dari Paroki yang disumbangnya.

Untuk itulah dalam mengupayakan perolehan dana dan mengatur penggunaannya, Paroki perlu manajemen keuangan yang baik. Untuk tujuan tersebut, pengelola keuangan Paroki membutuhkan informasi keuangan yang akurat. Keuangan Paroki dalam hal ini adalah uang dan harta benda Paroki yang berasal dari kolekte, amplop, persembahan, sumbangan dan usaha-usaha lain yang halal, serta pengeluaran untuk pembayaran tenaga kerja, membayar biaya utilitas seperti listrik, telepon, air serta urusan-urusan keuangan lainnya. Semua hal tersebut berkaitan dengan akuntansi. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Paroki yang dilakukan secara transparan dan kredibel tersebut, pedoman yang saat ini digunakan oleh Paroki adalah input data pemasukan pengeluaran kas dan bank,



penjelasan kas dan bank, arus kas, transaksi lain-lain, rekening silang, dan rekap arus kas dan bank selama satu tahun.

Mengingat pentingnya peranan pengelolaan keuangan dan akuntansi, maka sebagai organisasi nirlaba keagamaan Paroki Redemptor Mundi harus mengelola keuangannya secara profesional dalam suatu sistem akuntansi yang sesuai dengan standar pelaporan yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 45 sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting kepada umat. Berdasarkan PSAK 45 tersebut, laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan;
- b. Laporan aktivitas
- c. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan;
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Setiap entitas nirlaba diharapkan menyajikan pelaporan keuangan yang terdiri dari empat komponen tersebut. Namun pada praktiknya, masih terdapat kemungkinan adanya entitas nirlaba yang menyajikan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK 45. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terhadap pelaporan keuangan pada entitas nirlaba dengan mengacu pada PSAK 45. Maka, berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 45 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Paroki Redemptor Mundi Di Surabaya”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan pada Paroki Redemptor Mundi di Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan pada Paroki Redemptor Mundi di Surabaya.

1.3 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menjadi evaluasi dan informasi bagi organisasi yang berkecimpung dalam dunia usaha nirlaba bidang keagamaan agar dapat menerapkan akuntansi untuk organisasi nirlaba sebagaimana mestinya, khususnya dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan organisasi nirlaba dan PSAK No. 45.
- b. Membantu menyempurnakan pelaporan keuangan di Paroki Redemptor Mundi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.





1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Paroki Redemptor Mundi yang berada di Surabaya. Paroki Redemptor Mundi merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan sebagai sarana beribadah umat katolik. Paroki Redemptor Mundi dikategorikan dalam organisasi nirlaba keagamaan kerana memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk berbagai aktivitasnya dari sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain tidak mengharapakan imbalan. Paroki Redemptor Mundi harus mengelola keuangannya secara professional yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45.

Adapun topik pembahasan dari penelitian ini yaitu dengan melakukan analisa penerapan atas standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba terhadap laporan keuangan di bidang keagamaan (Paroki). Jenis metode penelitian adalah kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan survey secara langsung ke Paroki Redemptor Mundi dan melakukan wawancara dengan bendahara Paroki untuk mengetahui dan mencatat data – data yang di perlukan berupa : laporan keuangan Paroki Redemptor Mundi periode 2014, sejarah Paroki, struktur organisasi Paroki, Tata Dasar Paroki, sistem dan prosedur administrasi di Paroki, struktur organisasi bendahara paroki, pembagian divisi administrasi, dan prosedur penyusunan laporan keuangan di Paroki.

Data-data laporan keuangan Paroki Redemptor Mundi periode 2014 tersebut akan dianalisis dan diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No.45 untuk kemudian dapat menjadi evaluasi yang akan menjadi sebuah acuan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan Paroki Redemptor Mundi pada periode selanjutnya.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Organisasi Nirlaba

2.1.1.1 Pengertian Organisasi Nirlaba

Di Indonesia terdapat berbagai macam organisasi nirlaba yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu. Menurut Nainggolan (2012:2) Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dijalankan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu, namun tidak bertujuan untuk memperoleh laba.

Menurut Setiawati (2011:3), organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi sosial yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut PSAK No.45 organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1).

Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, museum, dll.



Organisasi nirlaba juga merupakan suatu organisasi atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, tanpa bertujuan untuk mencari laba, umumnya organisasi nirlaba memberikan pelayanan maupun jasa kepada masyarakat, dan laba yang diperoleh organisasi nirlaba tidak dibagikan, tetapi dikembalikan kepada organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasanya. Organisasi nirlaba dalam kehidupan sehari-hari ini semakin banyak keterlibatannya, sebagai wujud dari organisasi masyarakat yang berangkat dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat itu sendiri.

2.1.1.2 Karakteristik dan Tujuan Organisasi Nirlaba

Organisasi Nirlaba memiliki karakteristik dan tujuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis. Karakter dan tujuan organisasi nirlaba menjadi jelas terlihat perbedaannya ketika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas. Karakteristik khusus yang mendasari perbedaan tersebut menurut PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi keuangan nirlaba terutama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi Nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (IAI, 2012:130).

Karakteristik organisasi nirlaba pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Melalui sumberdaya yang diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan.
- b. Menghasilkan barang/ jasa tanpa bertujuan memupuk laba, walaupun ada laba, maka tidak pernah dibagikan kepada pendiri/ pemilik entitas.
- c. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus kembali, dan
- d. Kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya saat likuidasi.

Karakteristik umum sebuah organisasi nirlaba adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bermotif mencari keuntungan.
- b. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak.
- c. kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan.
- d. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi.
- e. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan.
- f. Dominasi profesional.
- g. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.

Namun demikian dalam praktik, organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi



ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

2.1.2 Akuntansi

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Hasiholan (2013:1) menyatakan bahwa Akuntansi (*accounting*) adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan kejadian ekonomi sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian akuntansi menurut Sugiri (2012:1) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi sebagai penyedia informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Menurut Mursyidi (2010:17) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Baridwan (2010:1) mendefinisikan akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.



Berdasarkan pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para pemakainya.

Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa dilihat, bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi harus:

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil;
- b. Memproses atau menganalisis data yang relevan;
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

2.1.2.2 Tujuan Akuntansi

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2011:1.5-1.6) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.



Tujuan akuntansi keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi informasi keuangan yang secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber ekonomi
2. Untuk memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan perubahan yang ada pada sumber sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha
3. Untuk memberi informasi keuangan yang bisa membantu penggunaanya dalam memperkirakan potensi perusahaan dalam mendapatkan laba
4. Untuk Memberi informasi penting yang lain tentang perubahan perubahan pada sumber ekonomi dan kewajiban
5. Untuk menyampaikan sedalam mungkin informasi lain yang masih berkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan

Menurut Slamet (2010:3-4) tujuan utama Akuntansi adalah memberikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Dari tujuan akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi yaitu, menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya,



memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan, serta membantu fungsi dan pengawasan sosial.

2.1.2.3 Fungsi dan Kegunaan Informasi Akuntansi

Menurut Yadiati (2010:5) fungsi akuntansi yang utama adalah sebagai informasi keuangan sebuah organisasi karena dari laporan akuntansi kita dapat melihat seperti apa kualitas yang ada dalam suatu organisasi dan seperti apa perubahan yang terjadi dalam organisasi. Akuntansi memberikan informasi dengan satuan ukuran uang. Informasi keuangan tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak yang akan membuat keputusan yaitu pihak intern dan ekstern suatu organisasi dalam aktivitas selanjutnya.

Dalam akuntansi ada dua macam informasi yang diberikan yaitu tentang nilai organisasi dan informasi tentang untung-rugi organisasi. Kedua informasi tersebut bermanfaat untuk :

- a. Mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki suatu organisasi.
- b. Mengetahui seperti apa perkembangan maju mundurnya organisasi.
- c. Sebagai landasan untuk menghitung pajak.
- d. Sebagai dasar untuk memutuskan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Fungsi atau kegunaan informasi akuntansi adalah untuk:

- a. Pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya.
- b. Membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan, serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen;



2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu organisasi merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak intern dan ekstern untuk mengamati perkembangan suatu organisasi. Dengan melihat laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh organisasi tersebut.

Menurut Munawir (2010:31) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan maupun organisasi yang bersangkutan.

Menurut Siswanto (2011:2) laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat pengujian dan penilaian kinerja bagian pembukuan, akan tetapi seiring dengan perkembangan



jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan suatu perusahaan maupun organisasi. Dengan melakukan penilaian tersebut maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan keuangan juga akan dapat dinilai kemampuan suatu perusahaan maupun organisasi dalam memenuhi kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya.

Menurut Fahmi (2011:8), tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap suatu organisasi.

Menurut Prastowo (2011:5) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Menyediakan informasi yang menyangkut kinerja organisasi, untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan, dan untuk merumuskan pertimbangan tentang efektivitas suatu organisasi.
3. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan yang bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi organisasi selama periode pelaporan.
4. Memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan.



2.1.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012:3)

beberapa karakteristik laporan keuangan adalah :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna dapat memahami setiap aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi.

3. Keandalan

Laporan keuangan juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.



4. Dapat diperbandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

2.1.4.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI.

Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang berfungsi memberikan acuan dan pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan maupun organisasi dalam lingkungan tertentu dengan kebutuhan yang berbeda sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam.

Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu: Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masing masing standar memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda baik dari sisi entitas, perlakuan akuntansi, dan cara penggunaannya.



Menurut Martani (2012:16) macam-macam Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) mengingat Indonesia, melalui IAI, telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012

IFRS sebagai standar internasional memiliki 3 ciri utama yaitu :

a. *Principles-Based*

Standar yang menggunakan principles-based hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang rule based, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat principles based mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (judgment) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan



substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat ntuk transaksi tersebut.

b. Nilai Wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan *historical cost*. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas dan untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan nilai wajar lebih relevan namun harga perolehan diyakini lebih reliabel.

c. Pengungkapan (*Disclosure*)

Ini diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.



2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Standar ini mengadopsi IFRS untuk small medium enterprise (SME) dengan beberapa penyederhanaan.

Standar ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhanaan dalam ETAP adalah:

- a. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca.
- b. Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.
- c. Tidak ada pengakuan lialibilitas dan aset pajak tagguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana. Namun, beberapa pihak berpendapat



penggunaan istilah ETAP memberikan kesan bahwa entitas tidak memiliki akuntabilitas. Padahal semua entitas pasti memiliki akuntabilitas pada publik namun tingkat akuntabilitasnya yang berbeda.

Standar ini efektif dapat digunakan untuk laporan keuangan tahun 2009. Entitas yang memenuhi kriteria menggunakan ETAP pada tahun 2011 harus memilih menggunakan SAK ETAP atau PSAK. Jika pada tahun 2011 tetap menggunakan PSAK maka pada tahun berikutnya harus konsisten menggunakan PSAK dan tidak boleh berubah menggunakan SAK ETAP.

3. Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan. Standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah).

Bank syariah menggunakan 2 standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK syariah.



4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Peraturan pemerintah ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 2014.

2.1.4.2 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Indonesia telah menetapkan standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Standar ini terkandung dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 yang merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Sebagai akibat dari perbedaan karakteristik antara organisasi bisnis yang berorientasi untuk mencari laba dan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Selain itu organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan sehingga timbul beberapa transaksi yang berasal dari sumbangan yang tidak dimiliki oleh organisasi bisnis.



2.1.5 PSAK NO. 45

2.1.5.1 Pengertian dan Tujuan PSAK No. 45

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. PSAK No.45 berisi tentang standar akuntansi untuk organisasi nirlaba yang menyatakan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sehingga organisasi nirlaba memiliki transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan.

Tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu IAI adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Dalam PSAK No.45 ini juga terdapat contoh bentuk laporan keuangan organisasi nirlaba.

2.1.5.2 Sifat Pembatasan Dana

Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.



Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang

2.1.5.3 Komponen Laporan Keuangan Nirlaba

Menurut PSAK No. 45 organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan,
2. Laporan aktivitas serta
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan



4. Catatan atas laporan keuangan.

Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu :

- a. Komponen laporan posisi keuangan organisasi nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis dikarenakan laporan posisi keuangan diurutkan berdasarkan likuiditasnya (kemampuan suatu asset untuk dengan mudah dikonversi menjadi kas)
- b. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas.
- c. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan modal sebagaimana layaknya organisasi bisnis.

Berikut penjelasan jenis dan komponen laporan keuangan organisasi nirlaba :

1. Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur- unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan,



dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih.

2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

Laporan aktivitas memiliki beberapa tujuan utama yaitu menyediakan informasi mengenai :

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
- b. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Adapun informasi dalam laporan laporan aktivitas, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode,



- b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa,
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut



kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu:

a. Arus kas dari aktivitas operasi.

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas.

b. Arus kas dari aktivitas investasi.

Arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dsb.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan



aset tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*), atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Pernyataan Standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan, juga memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan.

Informasi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi :

- a. Kebijakan Akuntansi.
- b. Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- c. Pengungkapan lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

2.1.6 Ruang Lingkup Paroki

1. Paroki merupakan Yayasan

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif Yayasan, pengertian Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan merupakan bagian dari perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum dengan pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu suatu Badan Hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.



Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya, keberadaan badan hukum Yayasan bersifat permanen. Yaitu hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan para pendiri dan anggotanya. Yayasan hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan dan persyaratan dalam anggaran dasarnya telah dipenuhi.

Syarat untuk mendirikan yayasan antara lain:

1. Yayasan harus memiliki tujuan sosial.
2. Yayasan harus dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Tidak bertentangan dengan susila.
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
5. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
6. Mempunyai susunan pengurus.

Maksud dan tujuan yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
3. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.



Dengan demikian, Yayasan merupakan perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sebagai subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum.

2. Pengertian Paroki

Paroki adalah komunitas kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam Keuskupan (Gereja Partikular).

Sebagaimana Gereja terutama adalah himpunan umat beriman, bukan gedung, maka pengertian paroki pun pertama-tama adalah himpunan orang, bukan sekedar wilayah, walaupun sifat kewilayahan sebagai aspek yang tetap juga inheren padanya (Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, kanon 515 art.

1). Uskuplah yang berwenang mendirikan, membubarkan atau mengubah Paroki (Kitab Hukum Kanonik kanon 515 art 2). Pada umumnya Paroki bersifat teritorial, bukan personal, bukan kategorial, di dalam prinsip organisasinya.

Kitab Hukum Kanonik 1983, menjelaskan pengertian paroki sebagai berikut : Paroki adalah jemaat tertentu kaum beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular dan yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup diosesan dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri.

Karena Paroki merupakan organisasi nirlaba dan juga merupakan yayasan Gerejawi, maka Paroki termasuk organisasi nirlaba. Sebagai bentuk dari organisasi nirlaba Paroki juga mempunyai kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan.



3. Pengertian Tata Dasar Paroki

Tata Dasar Paroki adalah suatu landasan berorganisasi Paroki, yang meliputi beberapa aturan yang disusun secara sistematis oleh suatu Paroki atau beberapa Paroki dari sudut pandang hukum secara umum meliputi nama, tempat kedudukan, azas, tujuan, keanggotaan, struktur, perbendaharaan, kerjasama, penerimaan anggota, serta perubahan dan pengesahan tata dasar. Tata Dasar Paroki digambarkan sebagai hukum internal yang ada di dalam Paroki untuk mengatur Paroki dalam menciptakan organisasi dan tata kerja paroki yang memiliki prosedur yang baik dalam pelaksanaan setiap program.

4. Struktur Organisasi Paroki

Struktur organisasi Paroki merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi Paroki dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi Paroki dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga hubungan antara aktivitas dan fungsi tugas yang dikerjakan. Di dalam struktur organisasi Paroki yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

5. Sumber Pembiayaan dan Pola Pertanggungjawaban Paroki

Sumber uang dan harta benda Paroki berasal dari kolekte, amplop persembahan, sumbangan dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan peraturan Tata Dasar Paroki. Tanggung jawab pengelolaan keuangan paroki



berada ditangan Pastor Kepala Paroki, yang pengelolaannya dijalankan oleh Pastor Kepala Paroki dibantu oleh Bendahara Paroki (Mahsun, 2007:5).

6. Tata Kelola dan Pedoman Keuangan Paroki

Paroki memerlukan manajemen dan akuntansi keuangan yang baik untuk mengatasi dan mengatur masalah-masalah keuangan di lingkup Paroki. Manajemen dan akuntansi keuangan Paroki termasuk dalam Tata kelola keuangan Paroki. Tata kelola keuangan Paroki adalah salah satu unit dari Paroki yang mempunyai kesatuan dengan Dewan Pastoral Paroki. Agar tata kelola ini dapat dijalankan dengan baik maka dibutuhkan perangkat dasaryang disebut dengan Pedoman. Pedoman inilah disebut dengan nama Pedoman keuangan dan akuntansi Paroki.

Adapun pokok-pokok dalam pedoman keuangan dan akuntansi Paroki adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar

Selain harus memenuhi standar pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini yaitu, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi bagi Paroki dan bagi umat.

2. Penanggung Jawab Keuangan Paroki

Secara hukum, Paroki diakui sebagai badan hukum yang dapat mempunyai dan mengelola aset. Pengelolaan keuangan paroki berada ditangan Pastor Kepala Paroki, dibantu oleh Bendahara Paroki.



3. Penyimpanan Uang

Untuk penyimpanan uang, aspek utama yang harus diutamakan adalah keamanan. Uang disimpan di tempat yang aman dan dengan cara yang aman. Dana kas disimpan dalam jumlah yang dibatasi dan selebihnya disimpan di bank.

4. Penggunaan Uang

Penggunaan uang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan kriteria sebagai berikut : selaras dengan kepentingan Paroki, sesuai dengan kebutuhan reksa pastoral, layak, wajar, tidak berlebihan dan efisien serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

5. Pencatatan

Pencatatan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Agar keuangan dapat dikelola dengan cara yang baik maka diharuskan ada pemisahan fungsi dan personalia.

6. Laporan Keuangan

Hasil dari proses ini adalah tersajinya laporan keuangan Paroki yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan Keuangan.



2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya

1. Devina (Surabaya,2013)

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Vincentia Devina Setyawati (Surabaya 2013) dengan judul “PENERAPAN PSAK NO.45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA YAYASAN YOHANES GABRIEL KORNIT DI BLORA.” dengan hasil penelitian sebahai berikut :

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada laporan keuangan Yayasan Yohanes Gabriel Kornit di Blora. Yayasan Yohanes Gabriel merupakan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan Yohanes Gabriel dipilih dalam penelitian ini karena Yayasan Yohanes Gabriel mengelola sekolah dalam jumlah yang besar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa laporan keuangan Yayasan Yohanes Gabriel Kornit di Blora disusun setiap akhir bulan. Laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Yohanes Gabriel Kornit di Blora hanya berupa laporan aktivitas. Jenis laporan aktivitas tersebut oleh Yayasan Yohanes Gabriel Kornit di Blora tidak disebut sebagai laporan aktivitas melainkan laporan keuangan. Hal ini berarti, Yayasan Yohanes Gabriel Kornit di Blora belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45 untuk organisasi nirlaba seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Terdapat kesalahan dalam penyebutan akun”

Penelitian yang dilakukan di organisasi keagamaan Paroki Rendemtor Mundi bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di Yayasan Yohanes Gabriel Kornit di Blora, mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba nirlaba terdapat



beberapa persamaan dan perbedaaan, yaitu:

Persamaan	Perbedaan
1.) Membahas mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK No. 45	1.) Peneliti sebelumnya menggunakan objek penelitian yayasan (organisasi pendidikan). Sedangkan peneliti menggunakan objek Paroki (organisasi keagamaan).

2. Meilani dan Pusung (Medan,2014)

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Angelia Novrina Meilani dan Tinungki Rudy J. Pusung (Manado 2014) dengan judul “PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO.45 PADA PANTI SOSIAL WERDAH HANA.” Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

“Penelitian bertujuan untuk menegetahui apakah penerapan pelaporan keuangan pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana telah sesuai dengan apa yang telah tercantum pada PSAK No.45. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik penumpulan data dengan cara wawancara, survey lapangan, dan studi kepustakaan. Dengan teknik analisis kualitatif deskriptif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan suatu data. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha Hana belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan nirlaba yang ada pada PSAK No. 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan pengeluaran, laporan realisasi dan laporan posisi kas menurut pemahaman mereka. Panti Sosial tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Panti Sosial Tresna Werdha



Hana sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertuang dalam PSAK No.45 agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan dan memiliki daya banding yang tinggi.”

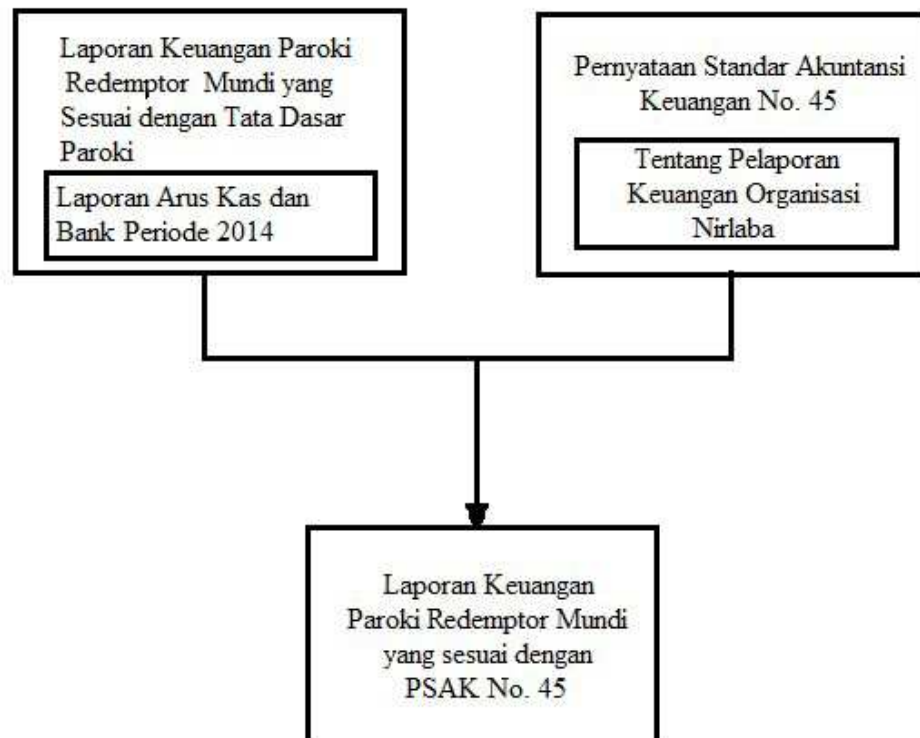
Persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah :

Persamaan	Perbedaan
1.) Berhubungan dengan laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK No.45.	1.) Peneliti sebelumnya menggunakan objek penelitian yayasan (organisasi sosial). Sedangkan, peneliti menggunakan objek Paroki (organisasi keagamaan).
2.) Menjelaskan proses dan administrasi keuangan yang sesungguhnya terjadi di organisasi	2.) Pada penelitian di Paroki Redemptor Mundi penulis akan memberikan gambaran laporan keuangan yang sesungguhnya terjadi di organisasi



2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran



Sumber : Penulis





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.